



# PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNTUK LAYANAN DASAR YANG BERKUALITAS DI INDONESIA

Desember 2024

# Apa itu SPM?



Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengatur jenis dan kualitas layanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara Indonesia. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 2/2018 dan regulasi terkait lainnya, SPM memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan layanan yang setara dan terstandarisasi di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, kesejahteraan sosial, dan perumahan.

SPM bukan hanya sekadar kebijakan atau sasaran, melainkan hak mendasar dari setiap warga negara Indonesia dan merupakan kewajiban yang mengikat pemerintah pusat dan daerah. Pemenuhan SPM merupakan esensi dari tata kelola pemerintahan yang baik.

## Mengapa SPM Penting?

Di Indonesia, masih terdapat banyak kelompok rentan dan wilayah yang kesulitan mengakses layanan dasar. Mengatasi kesenjangan ini adalah langkah penting untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. SPM menjadi salah satu fondasi dalam membangun kemajuan bangsa, sekaligus mencerminkan komitmen dan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam melayani masyarakat.



**Visi Indonesia Emas 2045:** SPM merupakan pilar utama untuk menciptakan bangsa yang sejahtera, setara, dan dihormati secara global.



**Keadilan:** SPM menjamin bahwa setiap warga negara, baik mereka yang berada di wilayah tertinggal maupun di perkotaan, memiliki akses yang sama terhadap layanan dasar.



**Akuntabilitas:** SPM menyediakan tolok ukur yang jelas untuk menilai kinerja pemerintah, sehingga kepercayaan publik dapat terjaga.



**Kehadiran Pemerintah:** Layanan dasar merupakan bentuk nyata dari kehadiran pemerintah di seluruh wilayah Indonesia.

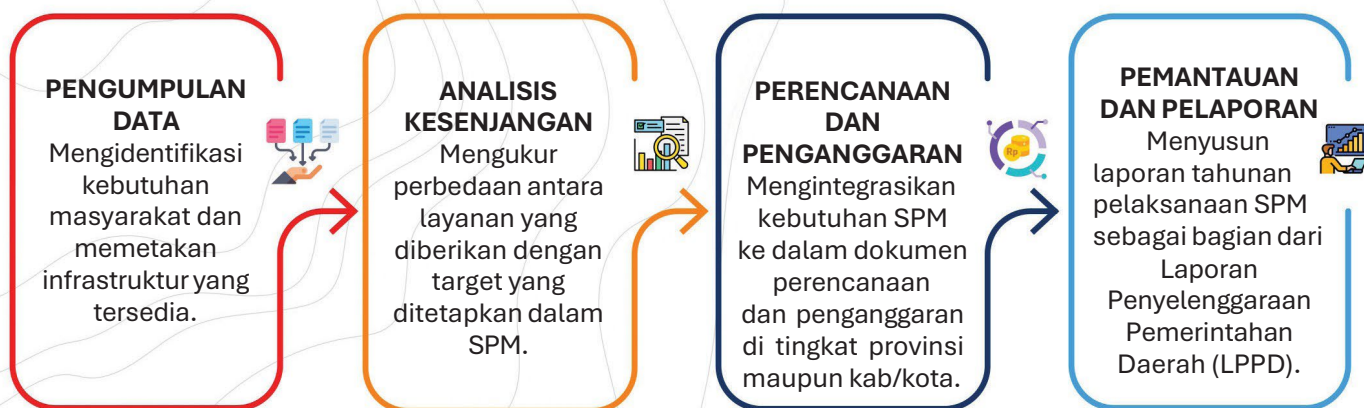


**Tanggung Jawab Negara:** Pemenuhan SPM merupakan tanggung jawab bersama untuk membangun Indonesia yang tangguh, bersatu, dan berdaya saing.

# Mengukur Pemenuhan SPM

Mengukur pemenuhan terhadap SPM tidak hanya berfungsi untuk memastikan akuntabilitas, tetapi juga tentang mengidentifikasi kesenjangan serta menemukan peluang untuk perbaikan. Laporan kepatuhan SPM menjadi wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam melayani masyarakat.

Evaluasi pemenuhan SPM dilakukan melalui:



## Peran Pemerintah Provinsi dalam Pemenuhan SPM

Pemerintah provinsi merupakan penghubung antara kebijakan nasional dengan implementasi di daerah dan kebutuhan masyarakat. Gubernur, sebagai Kepala Daerah, adalah penanggung jawab utama yang memastikan kehadiran pemerintah melalui layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Peran pemerintah provinsi dalam mendukung pemenuhan SPM meliputi:



### Koordinasi

Mengarahkan dan menyinergikan upaya kabupaten/kota dalam mencapai standar SPM.



### Pelaksanaan Regulasi

Mengimplementasikan peraturan daerah untuk mempercepat pencapaian SPM.



### Pengelolaan Anggaran

Mengkonsolidasikan berbagai sumber pendanaan untuk mendukung program pemenuhan SPM.



### Monitoring Kinerja

Memantau pelaksanaan SPM di tingkat kabupaten/kota melalui sistem e-SPM.



### Peningkatan Kapasitas

Memberikan pelatihan dan dukungan kepada aparatur pemerintah untuk memastikan pelaksanaan SPM berjalan efektif.

# Peluang untuk Pemenuhan SPM

Terdapat beberapa peluang untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan alokasi sumber daya, dan mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan mengatasi kesenjangan dalam regulasi, data, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan SPM, visi Indonesia yang tangguh dan berkeadilan dapat diwujudkan. Peluang-peluang tersebut meliputi:



## Dukungan Regulasi

Memperkuat peraturan daerah untuk mempercepat pemenuhan SPM, menyelaraskan kebijakan lintas sektor, dan menentukan peran yang jelas bagi tim pencapaian SPM.



## Data

Memastikan akurasi dan kelengkapan data serta memanfaatkan teknologi untuk analisis data secara real-time.



## Perencanaan

Mengintegrasikan indikator SPM ke dalam rencana strategis dan melibatkan komunitas dalam proses perencanaan.



## Penganggaran

Mengembangkan metode penghitungan biaya yang lebih akurat untuk mengurangi inefisiensi, mengatasi kesenjangan penganggaran melalui efisiensi, dan memprioritaskan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM.



## Pelaksanaan

Memastikan koordinasi rutin oleh Tim Penerapan SPM Provinsi dalam, memantau siklus perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan SPM, serta memberikan arahan strategis untuk memastikan pemenuhan SPM.



## Pemantauan & Evaluasi

Mengadopsi sistem pemantauan dan evaluasi berbasis elektronik (e-M&E), mengaitkan pencapaian SPM dengan insentif, serta meningkatkan kualitas pelaporan untuk menghasilkan termuan yang dapat ditindaklanjuti.